

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT ) DI KELURAHAN TEMBONG KECAMATAN CIPOCOK JAYA**

**Anggita Nurafia<sup>\*</sup>, Rina Yulianti<sup>\*\*</sup>, Arenawati<sup>\*\*\*</sup>**

<sup>\*</sup>, <sup>\*\*</sup>, <sup>\*\*\*</sup>) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untirta  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang

<sup>\*</sup>) [Anggitanurafia1@gmail.com](mailto:Anggitanurafia1@gmail.com), <sup>\*\*</sup>) [rina.yulianti@untirta.ac.id](mailto:rina.yulianti@untirta.ac.id),

<sup>\*\*\*</sup>) [arenawati@untirta.ac.id](mailto:arenawati@untirta.ac.id)

### **Abstrak**

There are several problems in the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Tembong Village, Cipocok Jaya District, Serang City, among others: poor understanding of the Duties, Principals and Functions of Regulations Regarding BPNT Program Distribution in Tembong Village, causing the condition of the available human resources to be of poor quality in implementing the program. BPNT, the socialization of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has not been carried out optimally so that the community is not aware of the existence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in the Tembong Kelurahan, the attitude of the implementers of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in the Tembong Kelurahan is still less responsive. The purpose of this study was to find out how the attitude of the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT). The theory used is the implementation theory of Van Metter and Van Horn, the research method used is qualitative. The results of this study The implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has not run optimally because of the lack of available budget that makes the socialization process uneven and the facilities and infrastructure experience problems when distribution.

**Keywords:** Policy Implementation, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT)

## 1. Pendahuluan

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dimasyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain, maka pemerintah sedang berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia saat ini melalui beberapa program yang dikeluarkan dan diatur oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya Undang-Undang tersebut perlu di evaluasi terkait dengan pelaksanaannya karena fenomena yang ada banyak kita jumpai di negara Indonesia saat ini.

Untuk mengatasi fenomena tersebut pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang dikeluarkan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu dalam rangka mendukung SNKI sesuai dengan

Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank Himbara. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan perluasan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 telah dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni tahap I pada bulan februari, tahap II pada bulan maret, tahap III pada bulan juli, dan tahap IV pada bulan agustus. Total KPM bantuan sosial pangan adalah sebesar 15,498,936 KPM yang tersebar di 514 Kab/Kota. Dalam ([www.Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com)) di akses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 21.00.

E-Warong di Kota Serang yang telah ditetapkan sebanyak 19 e-warong dan 13 Agen BNI 46 Kota Serang. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi Peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari

program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam kartu KKS elektronik tersebut, terdapat sistem *Saving Account* dan *e-Wallet/dompot* elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan ditabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau di singkat E-Warong Kube PKH. E-Warong Kube PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh kube jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube, E-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program BPNT.

Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan E-warong, maka Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Serang telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank- Bank Negara), seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri Serta Badan Usaha Logistik (Bulog/Koperasi). Untuk Kota Serang, Bank yang telah bekerjasama dengan e-warong adalah Bank BNI. Kemudian Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Serang Juga bekerjasama dengan Pendamping BPNT dan Kube Jasa yang beranggotakan 10 orang dan sebagai peserta penerima manfaat. Dalam melakukan transaksi, peserta yang dapat mencairkan dana tersebut adalah mereka yang telah memiliki KKS elektronik.

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini menggantikan program yang ada sebelumnya yaitu Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) yang belum terimplementasi dengan baik karena masih adanya kendala-kendala saat di lapangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan atau disebut e-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini memiliki tujuan yaitu untuk

mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Selain tujuan Program Bantuan Ketahanan Pangan ini memberikan beberapa manfaat bagi penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yaitu : meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta meningkatnya kebutuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Sosial Pangan adalah data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil

pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015.

Terkait dengan nilai bantuan yang diberikan kepada satu keluarga penerima manfaat yaitu sebesar Rp.110.000/KPM/bln. Keluarga penerima manfaat di Kelurahan Tembong ini setiap bulannya menukarkan jumlah uang yang tertera di rekening masing-masing masyarakat dengan produk pangan yang telah disediakan yaitu beras dan telur. Masyarakat menukarkannya di tempat yang sudah disediakan oleh para pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai ini yaitu dinamakan e-warung ( elektronik warung gotong royong ) yang merupakan agen perbankan anggota himbara sesuai harga yang berlaku.

E-warung ( elektronik warung gotong royong ) memiliki kriteria yaitu :

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*dua diligence*) sesuai dengan kebijakakn dan prosedur bank penyalur;
2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya;

3. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/took dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
4. Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar;
5. Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan (khusus bagi KPM lansia dan KPM disabilitas).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa terdapat satu e-warong yang bertempat di Kelurahan Tembong sebagai tempat pengambilan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu di Kampung Pabuaran. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Umiyati selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong ( 1 november 2019, pukul 08.00) mengatakan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa dirasakan manfaatnya karena dengan adanya Program BPNT ini bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga akan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi saat

ini. Salah satu syarat untuk dapat menjadi penerima bantuan yaitu masyarakat Kelurahan Tembong harus termasuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga wajib mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di kelurahan Tembong masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) telah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan telah melewati beberapa proses yang dimulai dari pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat bagi keluarga yang memenuhi kriteria yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa masalah terkait implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya yaitu seperti di bawah ini:

*Pertama*, Masih lemahnya upaya pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang sehingga menyebabkan data yang dipakai dalam proses penyaluran bantuan tidak di *update* terlebih dahulu dalam melaksanakan penyaluran bantuan Program BPNT di Kelurahan Tembong. Pengendalian merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus agar program dapat berjalan dengan optimal. Namun dalam implementasinya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong masih kurang dalam hal pengendalian yang

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Hal tersebut di benarkan oleh bapak Asmun selaku Ketua RT di Kampung Pabuaran Kelurahan Tembong (8 januari 2020, Pukul 10.00) bahwa dimulai dari data peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam penyaluran tidak adanya pembaruan data, Dinas Sosial Kota Serang dalam menjalankan Program Bantuan pangan non tunai dalam hal penyaluran tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan data, data yang dipakai adalah data Penerima Program Raskin (Beras Rumah Tangga Miskin). Dan pihak Dinas Sosial Kota Serang tidak pernah mengawasi terkait data Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap tahunnya apakah peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) setelah mendapatkan bantuan dalam beberapa tahun terakhir tingkat pendapatan keluarganya naik apa tidak karena peneliti menemukan beberapa data bahwa banyak peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pendapatan keluarganya telah meningkat akan tetapi masih menjadi peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau disebut juga dengan keluarga penerima manfaat (KPM).

*Kedua*, Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum dilakukan secara Optimal sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui

keberadaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong.

Sosialisasi mengenai kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dan Kelurahan Tembong. Menurut wawancara awal peneliti dengan Bapak Mushoffa selaku Ketua RT kampung Wakaf Kelurahan Tembong (8 januari 2020, Pukul 10.00). Dari Instansi tersebut tidak pernah ada sosialisasi Kepada masyarakat mengenai Perubahan Program Raskin (Beras Rumah Tangga Miskin) menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keberadaan Program BPNT belum dikenal oleh seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Tembong karena masyarakat hanya mengetahui bahwa bantuan yang ada saat ini adalah Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari Dinas Sosial Kota Serang Maupun Kelurahan Tembong kepada masyarakat sekitar terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

*Ketiga*, Sikap pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong masih kurang responsif. Sikap dari Bank Penyalur yaitu Bank BNI yang ada di Kelurahan Tembong masih kurang bertanggungjawab ketika terjadi kendala-kendala di lapangan seperti berkaitan dengan proses pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu adanya kendala dalam hal transaksi seperti

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mengalami gangguan ataupun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang dan Mesin EDC error maka pendamping masih kurang respons terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin.

## 2. Metode

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002 : 136) untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang pada tahun 2020. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

## 3. Hasil

Kota Serang ialah salah satu kota yang ada di Provinsi Banten yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu penanggulangan kemiskinan yang terjadi di

Kota Serang, ialah di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Berikut merupakan tabel Jumlah Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk Kecamatan se-Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Serang	12	2.837	2.345
2	Cipocok Jaya	8	1.992	1.617
3	Kasemen	10	6.192	5.495
4	Taktakan	13	1.577	1.245
5	Curug	10	1.852	1.650
6	Walantaka	14	1.811	1.584
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>16.261</b>	<b>13.936</b>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per-kecamatan di Kota Serang pada tahun 2018 dan 2019**

*Sumber : Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Serang pada tahun 2018 yaitu 16.261 KPM dan pada tahun 2019 yaitu 13.936 KPM yang tersebar di enam Kecamatan di Kota

Serang. Menurunnya jumlah peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena adanya kegagalan ketika membuka rekening kolektif (BUREKOL) yang dilakukan oleh pihak Bank Himbara hal ini karena adanya double data dan juga masyarakat yang sudah meninggal masih terdata dalam proses penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga pada tahun 2019 data jumlah peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurun.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama E-warong Kube**  
**Jasa PKH Kota Serang Tahun**  
**2018-2019**

No	Nama Kelompok	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Program
1	Priyayi Mandiri Sejahtera	Mesjid Priyayi	Kasemen	2018
2	Warong Kita	Wacung Indah	Kagungan	
3	Sahabat Sejahtera	Banjarsari	Cipocok Jaya	
4	Salila Sejahtera	Curug	Curug	
5	Sari Sejahtera Mandiri	Terith	Walantaka	
6	Taktakan Mandiri	Sayan	Taktakan	
7	Ikhlash Sejahtera	Terindol	Serang	
8	Pamandangan Damai Sejahtera	Unyur	Serang	
9	Maju Jaya Sejahtera	Cimuncang	Serang	
10	Amor Sejahtera	Pancajuwana	Cipocok Jaya	
11	Barokah Sejahtera	Sukalaksana	Cipocok Jaya	
12	Tanggul Indah	Banter	Kasemen	
13	Citra Madani Sejahtera	Kasunyatan	Kasemen	
14	Luhur Sejahtera	Sawah Luhur	Kasemen	
15	Taktakan Sejahtera	Taktakan	Taktakan	
16	Permata Sejahtera	Cigoong	Walantaka	
17	Cipocok Sejahtera	Panancangan	Cipocok Jaya	
18	Kagungan Mandiri	Kagungan	Serang	
19	Jaya Bersama	Taktakan	Taktakan	
		5	Pasir Kelapa	4

Sumber : Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat 19 e-warong di Kota Serang pada Tahun 2019 yang tersebar di 19 Kelurahan yang ada di Kota Serang dengan jumlah e-warong terbanyak yaitu 5 e-warong berada di Kecamatan Kasemen hal ini karena Kecamatan Kasemen adalah salah satu Kecamatan dengan jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbanyak yang ada di Kota Serang pada tahun 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh dari data Kelurahan Tembong pada tahun 2018, Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) disalurkan di dua belas kelurahan, yaitu Karundang, Kelapa, Pule, Pasir, Pancang Pasir, Cikamal Jaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

6	Pule	10
7	Kubang asem	3
8	Bulakan	5
9	Nancang pasir	9
10	Pabuaran	15
11	Pasir asem	2
12	Cikamal jaya	7
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>

Sumber : Kelurahan Tembong Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.5, dapat dilihat bahwa jumlah penerima Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong yaitu 108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di dua belas kampung yang ada di Kelurahan Tembong dengan jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbanyak yaitu terdapat di Kampung Tembong dan jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) paling sedikit terdapat di Kampung Pasir Asem.

#### 4. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teori Edward III ( dalam Leo, Agustino, 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik* ), untuk membantu penulis di dalam melihat kecenderungan para pelaksana di dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai ini. Sehingga akan terlihat apa yang sudah dilakukan dan bagaimana bantuan itu dilakukan.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementor adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh ) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga inginkan. Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai pelaksana kebijakan harus memahami pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Pertama, kognisi (pemahaman) serta respon (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.

Masih banyak yang belum memahami mengenai apa itu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan apa tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai itu sendiri, karena sosialisasi yang dilakukan belum sampai ke seluruh pelosok-pelosok daerah sehingga masih ada masyarakat yang masih awam terhadap pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai ini maka dari itu seharusnya memang sosialisasi dilakukan secara terus-menerus akan tetapi pada pelaksanaannya tidak

seperti itu hal ini karena minimnya anggaran yang ada.

Masih banyak masyarakat yang belum siap dengan adanya peralihan mekanisme penyaluran yang semula sistem manual menjadi mekanisme akun elektronik, masih ada sebagian masyarakat yang masih belum siap dengan beralihnya sistem manual menjadi akun elektronik karena menurut masyarakat ini hal yang ribet tidak seperti program Raskin dahulu yang sistemnya manual, akan tetapi masyarakat menerima adanya peralihan proses penyaluran menggunakan mekanisme akun elektronik karena memang akan lebih efektif dan efisien daat penyaluran.

Sosialisasi sangatlah penting terutama sosialisasi yang dilakukan harus menyentuh semua masyarakat yang ada di setiap daerah karena pentingnya sosialisasi untuk telaksananya program dengan maksimal karena ketika sosialisasi tidak merata akan membuat masyarakat menjadi awam terhadap program yang ada terutama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga pelaksanaan program akan menjadi terhambat.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tentu membuat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi tidak maksimal. Selain itu dengan beralihnya

Program Raskin ke BPNT tentu membuat masyarakat kebingungan apa perbedaan diantara keduanya dan ternyata perbedaan tersebut ada pada sistem penyaluran yang melalui mekanisme akun elektronik sehingga banyak hal-hal yang harus di sosialisasikan secara maksimal dimulai dari alat pembayarannya menggunakan Kartu seperti ATM yang disebut juga dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan sistemnya penyalurannya pun berbeda yaitu dengan menggunakan E-Wallet. Akan tetapi, hal ini merupakan kemajuan dari suatu sistem teknologi dan suatu usaha pemerintah untuk menunjukkan hal yang lebih transparan kepada masyarakat saat penyaluran. Program ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Masyarakat yang tidak mampu mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk membantu mereka dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangannya, selain itu respon dari masyarakat itu sendiri sangat baik dengan adanya program tersebut karena menurutnya pemerintah telah membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di negara indonesia ini.

Hal di atas, tentunya sangat bergantung pada bagaimana para implementor melaksanakan program tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien, artinya ada penanganan serius

terkait program tersebut agar jelas dan pasti sampai ke masyarakat. Selain itu dalam proses pelaksanaan program tentunya ada beberapa tahap yang harus dilewati dan dalam pelaksanaannya karena ini sistemnya elektronik maka ada kerjasama dengan pihak swasta yaitu bank himbara sebagai bank penyalur.

Dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih kurang responsif dari agen pelaksana itu sendiri salah satunya dari pihak bank penyalur, karena hampir setiap bulannya ada saja masyarakat yang melapor kesini terkait keluhan-keluhan mereka yang tidak cepat direspon oleh pihak bank penyalur seperti kendala kartu hilang ataupun nominal yang tidak muncul sehingga masyarakat tidak bisa mengambil bantuan sesuai waktunya.

Melihat gambaran di atas sikap dari agen pelaksana sangat menentukan jalannya suatu program tersebut dapat berjalan dengan maksimal sehingga kendala-kendala yang terjadi dilapangan bisa teratasi dengan baik dan tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong dalam hal ini selalu berusaha membantu masyarakat yang masih awam dan belum paham terkait mekanisme penyaluran dan juga saya selalu berkoordinasi dengan pihak bank penyalur

saat terjadi kendala saat proses penyaluran akan tetapi pihak bank penyalur tidak dengan cepat merespon.

Proses penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat diimplementasikan dengan baik karena mengingat jumlah kemiskinan yang cukup tinggi tentu membuat pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan baik agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, selain itu juga pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat tidak mampu dapat terpenuhi dengan adanya bantuan tersebut. Hal ini tentu menjadi hal yang utama untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di indonesia agar tidak ada masyarakat yang kelaparan karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada yaitu untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di indonesia Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bertujuan untuk membantu sebagian kebutuhan pangan keluarga tidak mampu sehingga bisa memenuhi kebutuhannya, selain itu juga membantu memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat

(KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). sehingga dalam pelaksanaannya agar berjalan dengan efektif dan efisien tentu butuh kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dengan masyarakat agar implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berjalan dengan maksimal.

Program- program yang ada di tingkat daerah tentu sudah ada maksud dan tujuan pembuatannya. Hanya saja fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya sehingga membuat pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai pelaksanaannya masih belum optimal dilakukan. Sosialisasi yang tidak sampai ke pelosok-pelosok daerah tentu membuat pemahaman masyarakat masih belum paham terkait adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini.

## **5. Kesimpulan**

Instansi atau lembaga terkait sudah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan,

memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat , memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Dinas Sosial Kota Serang berperan untuk mensosialisasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang proses pelaksanaannya sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana mekanisme penyaluran menggunakan mekanisme akun elektronik yaitu berkaitan dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Namun, dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai belum optimal yang disebabkan oleh beberapa aspek yaitu diantaranya aspek sumberdaya manusia yang masih belum berkualitas tentu membuat pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum berjalan dengan optimal. Selain itu, Sosialisasi yang dilakukan hanya dikelurahan saja sehingga memang tidak tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai. Tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh

instansi/lembaga terkait karena minimnya anggaran yang dimiliki, anggaran yang dimiliki tidak bisa memenuhi kebutuhan proses sosialisasi dan masih kurangnya tanggungjawab dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi saat dilapangan yang dilakukan oleh para pelaksana program tentu membuat pelaksanaan program menjadi tidak optimal.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2016

Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Penerbit Kencana

Edward III, Implementasi kebijakan Publik. Indiahono Dwiyanto. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis*.2009. Yogyakarta: Gava Media

Agustino, Leo.2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta

Nugroho Rian.2014. *Public Policy*. Jakarta: PT.Gramedia

Winarno Budi.2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Jakarta : PT.Buku Seru

Wahab solichin.2012. *Analisis Kebijakan(dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

### DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai